5. PERMOHONAN BANDING DI DALAM KASUS HARIS – JALAN BATU

Oleh : Mr. Soemarno P. Wirjanto*)

1. Apakah arti "putusan hakim mendapat kekuatan pasti"?

Inilah inti persoalan di dalam Kasus Haris – penembakan di Jalan Batu, di mana Jaksa yang mula-mula sudah menyatakan menerima putusan, kemudian berusaha mohon banding.

Jelas hal ini merupakan kejadian pertama, dan karena itu adalah interessant untuk ditinjau dari segi *pertumbuhan hukum acara pidana di Indonesia*. Dan karena kita ingin membicarakan pertumbuhan hukum, maka kita jangan mengikat diri pada undang-undang *Kalau kita ingin menumbuhkan hukum, kita harus berani melepaskan diri dari undang-undang*.

Contoh: Hukum tentang pengganti kerugian akibat perbuatan orang lain yang melanggar hukum (Schade vergoeding by onrecht matige daad) telah ditulis dan dimatikan di dalam pasal 1365 Bw. Tetapi peraturan mati itu lalu dihidupkan oleh hakim-hakim Hooge Raad menjadi putusan terkenal tahun 1919 yang menyimpang/melanggar pasal 1365 Bw. Perkembangan berjalan terus oleh hakim dan ilmu hukum sehingga menjadi "hak ganti rugi untuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah" (Schade vergoeding by onrecht matige overheids daad). Dari akhirnya menjadi *hak ganti rugi untuk perbuatan yang tidak melanggar hukum oleh pemerintah* (Schade vergoeding by recht matige overheids daad).

Contoh: Pemda DKI Jakarta mempraktekkannya yaitu *memberi ganti rugi kepada rakyat yang diambil tanahnya secara syah untuk pembangunan*. Saya kira pada umumnya dasar hukum untuk ganti rugi terakhir ini belum pernah dipikirkan.

2. Peringatan panjang lebar di atas perlu ditulis, karena pendapat-pendapat sarjana-sarjana hukum yang kami baca di koran-koran, tentang permohonan banding dalam kasus Haris, semuanya mendasarkan kepada HIR, tidak ada yang lepas dari HIR. Sedangkan menurut pendapat kami "kasus banding Haris" ini hanya dapat dimengerti dengan memakai dasar hukum di luar HIR dan undang-undang lainnya. Karena itu adalah interessant sebagai gejala perkembangan hukum positif di luar Undang-undang.

3. Bolehkah Jaksa tukar pendapat?

Fungsional Jaksa adalah advokat. Clientnya adalah negara atau pemerintah atau rakyat umum. Jaksa adalah pembela kepentingan rakyat umum/pemerintah. *Karena itu adalah baik, kalau jaksa memperhatikan klientnya.*

*) Advokat.

Rakyat, terutama mahasiswa, berreaksi terhadap putusan pembebasan Haris. Mereka tidak terima. Karena itu Jaksa harus naik banding untuk memenuhi keinginan clientnya.

Tetapi Jaksa yang bersidang sudah terlanjur menyatakan menerima putusan, tidak banding. Jaksa Agung sebagai atasan Jaksa yang bersidang berhak memerintahkan kepada Jaksa yang bersidang untuk mohon banding. Tentunya dengan mencabut pernyataan menerima putusan dulu.

Bolehkah itu?

4. Banyak sarjana hukum, termasuk hakim yang bersidang, menyatakan pendapat, bahwa itu tidak boleh. Alasan yang dipakai ialah bahwa "putusan kasus Haris sudah mencapai kekuatan pasti". Ada juga yang menambah: "Tidak dapat berubah lagi".

Pendapat itu kami tidak setuju. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung itu adalah pengadilan-pengadilan manusia. Bahkan pada umumnya waktu ini dinilai tidak begitu memuaskan.

Putusan Pengadilan manusia tidak mungkin dianggap tak dapat dirobah lagi karena selalu ada kemungkinan keliru. Jadi istilah "*putusan pengadilan mencapai kekuatan pasti*" adalah salah.

5. Aslinya dalam bahasa Belanda adalah: "Het vonnis is inkracht van gewysde gegaan". Ini terjemahan secara keliru dengan "Putusan telah mendapat kekuatan pasti".

"Vonnis" adalah hukum yang ditemukan oleh hakim. "Gewysde" adalah hukum yang "*ditunjuk*" oleh hakim. Kedua hal yang sedikit berbeda itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata "Putusan Pengadilan".

"Menemukan hukum", "recht vinding", "to fill the law", adalah kira-kira seperti pekerjaan seniman yang menciptakan sajak, drama (play) atau lagu. Ide-idenya sudah ada, nada-nada lagu sudah ada tetapi dibutuhkan "divinatorische Ahnuung" seorang seniman untuk merangkai nada-nada itu menjadi lagu yang merdu, penuh berisi rasa.

Begitu juga hukum "het recht is er. Het moet worden gevonden" kata Paul Scholten. Hukum itu selalu ada, Keadilan selalu ada, tetapi diperlukan *kesenian sang hakim* untuk menemukan.

"Recht wijsen" yang menghasilkan "gewijsde" boleh dipersamakan dengan hukum yang sudah ready-stock, siap pakai, tinggal menunjuk saja.

Jadi putusan hakim yang tadinya bersifat penemuan hakim, setelah banding dan kasasi menjadi putusan yang hukumnya siap pakai (gewijsde).

Jadi adalah salah mengira bahwa "*in kracht van gewijsde*" berarti tak dapat dirobah lagi. Salah untuk menterjemahkan dengan "mencapai kekuatan pasti".

6. Proef op de som.

a. Di Amerika putusan hakim yang sudah tingkat tertinggi masih selalu dapat dirobah-robah. Tidak terbatas berapa kali. Asal ada alasan yang cukup kuat.

- b. Dengan grasi semua "putusan pasti" dapat dirobah.
- c. Request-civil, peradilan ulangan, herziening semua merobah "keputusan pasti".

Kesimpulan: Semua putusan dapat dirobah. Alasan "keputusan pasti" tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menolak permohonan banding dalam Kasus Haris – jalan Batu.

7. Segala yang tersebut di atas belum memberi jawaban, apakah pemohon banding dengan mencabut pernyataan menerima putusan itu dapat diterima.

Di pihak Jaksa, terang ada kepentingan nyata dan moril dapat dipertanggungjawabkan. Jaksa menuruti kemauan clientnya yang minta supaya ia naik banding.

Di pihak hakim, menurut pendapat kami, bukan hakim yang bersidang yang berwenang menentukan. Pengadilan Negeri harus menerima permohonan banding itu dan Pengadilan Tinggi yang nanti di dalam sidang memutuskan apakah permohonan banding itu dapat diterima atau tidak.

Kalau ditolak, maka Jaksa masih ada kesempatan untuk mohon kasasi. Dan Mahkamah Agung di dalam sidang memutus apakah permohonan kasasi itu dapat diterima atau tidak.

8. Terbaca berita juga, bahwa Kejaksaan Agung pada waktu ini akan mengajukan soal permohonan banding yang ditolak oleh Pengadilan Negeri (secara tidak berhak) itu langsung kepada Kejaksaan Agung.

Ini tidak salah, sebab Mahkamah Agung selaku Pengawas tingkah laku hakim-hakim dapat memerintahkan agar Pengadilan Negeri menerima permohonan banding dan meneruskannya kepada Pengadilan Tinggi untuk diputus. Soal permohonan banding tidak termasuk Kebebasan Hakim. Tunduk pada pengawasan.

Sekian pendapat-pendapat kami tentang soal permohonan banding di dalam Kasus Haris – Jalan Batu. Berhubung peninjauan kami dari segala pertumbuhan/pembangunan/modernisasi hukum acara pidana, maka kami sengaja tidak membaca undang undang HIR atau undang-undang lain.

Tetapi tanpa mengurangi, bahwa yang di atas itu adalah hukum Positif. Yaitu hukum yang harus ditegakkan oleh semua penegak hukum dan ditaati oleh Rakyat.

Post scriptum:

Terlupa menulis di atas apa arti sebenarnya daripada "in kracht van Gewijsde".

Arti sebenarnya adalah: bahwa *putusan itu sudah boleh dilaksanakan*. Jadi executabel. Bukan tidak dapat dirobah kemudian.

Tidak sempat lagi membicarakan soal "kepastian hukum" dalam soal ini. Mohon dimaafkan.

Bagi Pengadilan Tinggi mengadili ulang, kasus Haris ini merupakan kesempatan baik untuk memuaskan Rasa Keadilan Rakyat.